PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA, UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA TERHADAP KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019-2023

TUGAS AKHIR

Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana

RISTIANA PLORE

NIM. B1011201180

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2025

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama	:	Ristiana Plore
NIM	:	B1011201180
Jurusan	:	Ilmu Ekonomi
Program Studi	:	Ekonomi Pembangunan
Judul Proposal / TA	:	Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, Upah Minimum Kabupaten/Kota Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir (TA)* dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir).

Apabila di dalamnya terdapat kesalahan dan kekeliruan maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis yang dapat berakibat pada pembatalan Tugas Akhir (TA) dengan judul tersebut di atas.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 19 Maret 2025



Ristiana Plore)
B1011201180

PERTANGGUNG JAWABAN TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Ristiana Plore
NIM	:	B1011201180
Jurusan	:	Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
Program Studi	:	Ekonomi Pembangunan
Tanggal Ujian	:	22 Januari 2025
Judul Tugas Akhir	:	Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, Upah Minimum Kabupaten/Kota Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023".

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir (TA) ini adalah hasil karya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Pontianak, 24 Maret 2025

Ristiana Plore

NIM.B1011201180

LEMBAR YURIDIS

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka,
Upah Minimum Kabupaten/Kota
Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2019-2023

Penanggung Jawab Yuridis

Ristiana Plore
B1011201180

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Tgl Ujian Tugas Akhir (TA) : 22 Januari 2025

Majelis Penguji

No.	Majelis Penguji	Nama/NIP	Tgl/bln/thn	Tanda Tangan
1.	Pembimbing Utama	Muz'an Sulaiman, S.E., M.M.	19-03-2025	
		NIP 196108241987031003		
2.	Ketua Penguji	Dr. Jumhur, S.E., M.Si.	19-03-2025	
		NIP 196709281997021001		
3.	Anggota Penguji	Dr. Meiran Panggabean, S.E., M.Si.	18-03-2025	
		NIP 196205251987031002		

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus
Dalam Ujian Tugas Akhir (TA)

Pontianak, 21 MAR 2025
Koordinator Program Studi Ekonomi Pembangunan

Yanto, S.E., M.Sc.
NIP 197706152003121004

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat-Nya yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan Tugas Akhir Ristiana Plore yang berjudul "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, Upah Minimum Kabupaten/Kota Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023". Penulisan Tugas Akhir ini merupakan salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.

Penulis memberikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Muz'an Sulaiman, S.E., M.M. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, membagikan ilmu pengetahuan, dan dengan sabar membimbing akan kekurangan pengetahuan penulis terutama selama pengerjaan Proposal dan Tugas Akhir ini.

Tugas Akhir ini dapat terselesaikan berkat dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karenanya penulis dengan ketulusan dan kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Barkah, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.

2. Ibu Nurul Bariyah, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.

3. Bapak Yanto, S.E., M.Sc. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.

4. Ibu Dr. Rini Sulistiawati, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan akademik serta memberikan arahan selama masa masa studi perkuliahan.

5. Bapak Muz'an Sulaiman, S.E., M.M.. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang sangat luar biasa baiknya untuk membimbing serta memberikan arahan dan saran yang dapat membantu menyelesaikan penulisan dengan baik.

6. Bapak Dr. Jumhur, S.E., M.Si. selaku Dosen Penguji Pertama terima kasih atas segala kesempatan dan perhatian serta masukan-masukan yang telah diberikan dalam penulisan Tugas Akhir ini.

7. Bapak Dr. Meiran Panggabean, S.E., M.Si.. selaku Dosen Penguji Kedua terima kasih juga atas segala kesempatan dan perhatian serta masukan-masukan yang telah diberikan dalam penulisan Tugas Akhir ini.

8. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah banyak memberikan pengetahuan dan pembelajaran selama masa studi.

9. Seluruh Staf Akademik, Perpustakaan, dan Tata Usaha serta seluruh karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah berperan penting dalam kegiatan perkuliahan dan beratanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik.

10. Terimakasih kepada kedua orang tua tercinta Bapak Iswan Tarmiji dan Ibu Rutniyati yang selalu ada dan mendukung dalam berbagai aspek serta mendoakan setiap waktu agar dapat memperoleh dan menyelesaikan pendidikan tinggi dengan tepat waktu.

11. Terimakasih kepada kedua adik perempuan terkasih Meme dan Vania dan keluarga besar yang turut memberikan semangat dan motivasi selama ini.

12. Terimakasih kepada kekasih hati, sahabat, sekaligus berperan menjadi abang 'Abraham Lingkun' yang setia berjuang menemani dan membantu setiap proses perkuliahan hingga sampai pada saat titik ini.

13. Terimakasih kepada Dhea Desnita Putri yang selalu bersama saat susah maupun senang selama masa sekolah hingga pembuatan tugas akhir ini dan yang sudah rela selalu direpotkan.

14. Terimakasih kepada sahabat sejati Fucek generation dengan dhea, gadis, Andrew, dan caca didalamya.

15. Terimakasih kepada Team Beliau dengan Meisya, Bella, Erza, Azra, Anjelita, dan Dewi yang sudah sangat banyak memberi bantuan dan informasi juga selalu membersamai dalam masa perkuliahan.

16. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan lainnya dan yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang sudah banyak berbagi informasi dan pengalaman selama perkuliahan yang sangat membantu.

17. Terimakasih dan maaf teruntuk diri sendiri atas setiap langkah yang diambil dan setiap jam yang dihabiskan. Akhirnya, Tugas Akhir ini selesai. Sangat bersyukur karena sudah dapat melewati banyak suka dan duka untuk menyelesaikan pendidikan tinggi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) di Universitas Tanjungpura Pontianak.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis bersedia menerima saran dan kritik yang membangun agar penulisan tugas akhir ini menjadi lebih baik. Penulis berharap semoga penulisan ini dapat memberikan manfaat dan dapat menjadi informasi tambahan bagi penelitian lain atau semua pihak yang membutuhkan.

Pontianak, 24 Maret 2025

Ristiana Plore

NIM. B1011201180

PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA, UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA TERHADAP KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019-2023

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji serta menganalisis pengaruh indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka, dan upah minimum kabupaten/kota terhadap kemiskinan di Kalimantan Barat. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019-2023. Data diolah menggunakan alat analisis regresi linear berganda dengan software E-views 10. Model yang digunakan adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan, diperoleh bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kalimantan Barat. Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Kalimantan Barat. Sedangkan upah minimum kabupaten/kota berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan.

Kata Kunci*: Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, Upah Minimum, Kemiskinan.*

PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA, UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA TERHADAP KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019-2023

RINGKASAN

1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan adalah permasalahan yang rumit dan kompleks, dan masalah ini terjadi di berbagai negara terutama negara yang sedang berkembang tidak terkecuali Indonesia. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk menunjang perkembangan ekonomi namun masih belum mampu menghilangkan masalah ini. Pembangunan ekonomi hanya memunculkan dampak secara teori, namun belum menjadi jaminan pasti untuk menuntaskan kemiskinan. Pembangunan ekonomi yang rendah memiliki keterkaitan dengan rendahnya modal dasar yang dimiliki masyarakat berupa rendahnya pendidikan, tingkat kesehatan, rendahnya produktivitas yang menjadi penyebab tingginya angka pengangguran, serta upah yang rendah yang tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari masyarakat.

Kemiskinan di Indonesia mengalami ketidakstabilan sejak tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2020, tingkat kemiskinan meningkat dibandingkan 2019 akibat adanya pandemi COVID-19, yang menyebabkan banyak masyarakat kehilangan pekerjaan dan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Namun, dimulai dari 2021 hingga 2023, tingkat kemiskinan berangsur-angsur menurun. Tantangan utama meliputi kesenjangan wilayah, distribusi kekayaan yang tidak merata, ketergantungan pada sektor primer, konflik agraria, dan keterbatasan layanan publik. Untuk mengatasi kemiskinan, diperlukan strategi komprehensif seperti pemberdayaan masyarakat, peningkatan infrastruktur, akses layanan dasar yang merata, dan kebijakan inklusif. Pendekatan multidimensi yang mencakup kesehatan, pendidikan, dan ketahanan ekonomi diperlukan untuk memastikan pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan.

2. Permasalahan

1) Apakah indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap kemiskinan kabupaten/kota Kalimantan Barat ?
2) Apakah tingkat pengangguran terbuka berpengaruh terhadap kemiskinan kabupaten/kota Kalimantan Barat ?
3) Apakah upah minimum kabupaten/kota berpengaruh terhadap kemiskinan kabupaten/kota Kalimantan Barat ?

3. Tujuan

1) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Kalimantan Barat.
2) Untuk menguji dan menganalisis tingkat pengangguran terbuka terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Kalimantan Barat.
3) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh upah minimum kabupaten/kota terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Kalimantan Barat.

4. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang menggunakan data panel dari 14 kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Barat selama kurun waktu 5 tahun dari 2019 hingga 2023. Data bersumber dari Badan Pusat Statistik dan sumber terkait lainnya. Alat analisis yang digunakan untuk pengolahan data dengan menggunakan program *Eviews 12.*

5. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian berdasarkan uji yang telah dilakukan menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat ditunjukkan dengan nilai t-statistic -3,211258 dan probabilitas 0,0022. Tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat ditunjukkan dengan nilai t-statistic 0,820933 dan probabilitas 0,4154. Upah minimum kabupaten/kota memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat ditunjukkan dengan nilai t-statistic -0,171623 dan probabilitas 0,8644. Secara simultan variabel indes pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka, dan upah minimum secara bersama-sama berpengaruh terhadap kemiskinan.

6. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan dapat dipeoleh kesimpulan bahwa indeks pembangunan Mmanusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat dengan koefisien -0,276969 dan probabilitas 0,0022 ($p < 0,05$). Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh posiif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat dengan koefisien 0,037380 dan probabilitas 0,4154 ($p > 0,05$). Upah Minimum Kabupaten/Kota berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat dengan koefisien -0,002723 dan probabilitas 0,8644 ($p > 0,05$).

Rekomendasi yang dapat diberikan setelah ini adalah diperlukan usaha dalam mengupayakan strategi yang lebih efektif dalam mengentaskan kemiskinan, diperlukan strategi terpadu yang mencakup pemerataan akses pendidikan dan kesehatan, pengembangan keterampilan kerja, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pembangunan manusia. Selain itu, upaya pengurangan pengangguran dapat dilakukan dengan menciptakan lapangan kerja lokal, meningkatkan akses terhadap

informasi kerja, dan mendorong wirausaha. Relevansi upah minimum terhadap kesejahteraan dapat ditingkatkan melalui perluasan jangkauan pada sektor informal, pemberian insentif bagi pengusaha, dan penghubungan upah minimum dengan peningkatan produktivitas. Langkah-langkah pendukung seperti pengentasan ketimpangan akses, penguatan program perlindungan sosial, dan sinergi kebijakan lintas sektor juga diperlukan untuk memastikan dampaknya merata dan berkelanjutan. Pemerintah dan masyarakat juga harus bersama-sama turut berperan aktif dalam mengentaskan masalah kemiskinan.

DAFTAR ISI

ABSTRAK vii
RINGKASAN viii
DAFTAR ISI xi
1. PENDAHULUAN 2
2. KAJIAN LITERATUR 8
2.1 Teori Lingkaran Setan (Theory Vicious Circle Of Poverty) 8
2.2 Kajian Empiris 11
2.3 Kerangka Konseptual & Hipotesis 12
3. METODE PENELITIAN 13
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 16
4.1 Uji Asumsi Klasik 16
4.2 Pembahasan 20
5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 23
5.1 Simpulan 23
5.2 Rekomendasi 23
DAFTAR PUSTAKA 24
LAMPIRAN 26

PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA, UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA TERHADAP KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019-2023

[1]Ristiana Plore

Universitas Tanjungpura, Indonesia

ABSTRACT

This research aims to test and analyze the influence of the human development index, open unemployment rate, and district/city minimum wages on poverty in West Kalimantan. This research is quantitative descriptive research using secondary data sourced from the Central Statistics Agency (BPS) for 2019-2023. The data was processed using multiple linear regression analysis tools with E-views 10 software. The model used was the Fixed Effect Model (FEM). Based on the results of the tests that have been carried out, it was found that the human development index has a negative and significant effect on poverty in West Kalimantan. The open unemployment rate has a positive and insignificant effect on poverty in West Kalimantan. Meanwhile, the district/city minimum wage has a negative and insignificant effect on poverty.

Keywords: *Human Development Index, Unemployment, Minimum Wage, Poverty*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji serta menganalisis pengaruh indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka, dan upah minimum kabupaten/kota terhadap kemiskinan di Kalimantan Barat. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019-2023. Data diolah menggunakan alat analisis regresi linear berganda dengan software E-views 10. Model yang digunakan adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan, diperoleh bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kalimantan Barat. Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Kalimantan Barat. Sedangkan upah minimum kabupaten/kota berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan.

Kata Kunci*:* *Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, Upah Minimum, Kemiskinan.*

[1] b1011201180@student.untan.ac.id

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah permasalahan yang rumit dan kompleks, dan masalah ini terjadi di berbagai negara terutama negara yang sedang berkembang tidak terkecuali Indonesia. Hingga kini kemiskinan masih menjadi permasalahan yang meskipun sudah dilakukan berbagai macam upaya oleh banyak pihak, namun masih sulit untuk dihilangkan sepenuhnya. Dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan, pemerintah sudah melakukan berbagai macam upaya diantaranya program bantuan sosial yang berupa uang tunai maupun sembako, pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dalam bekerja, serta berbagai jenis sosialisasi untuk pengembangan sumber daya manusia dan masih banyak program lainnya untuk mengentaskan permasalahan ini. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk menunjang perkembangan ekonomi namun masih belum mampu menghilangkan masalah ini. Pembangunan ekonomi hanya memunculkan dampak secara teori, namun belum menjadi jaminan pasti untuk menuntaskan kemiskinan. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Rasyid (2018) yang menyebutkan bahwa tingginya pertumbuhan ekonomi merupakan akibat dari pembangunan ekonomi namun tidak menjadi jaminan bagi kemiskinan tidak terjadi lagi.

Pembangunan ekonomi yang rendah memiliki keterkaitan dengan rendahnya modal dasar yang dimiliki masyarakat berupa rendahnya pendidikan, tingkat kesehatan, rendahnya produktivitas yang menjadi penyebab tingginya angka pengangguran, serta upah yang rendah yang tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik pangan maupun non pangan. Kebutuhan dasar tersebut meliputi sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. BPS mengukur kemiskinan dengan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar *(basic needs approach*). Jumlah masyarakat dalam kelompok mskin yang tinggi di sebuah daerah atau wilayah juga ditandai dengan penurunan daya konsumsi masyarakat akibat pendapatan yang rendah.

Kemiskinan di Indonesia mengalami ketidakstabilan sejak tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2020, tingkat kemiskinan naik 2% dibandingkan 2019 akibat adanya pandemi COVID-19, yang menyebabkan banyak masyarakat kehilangan pekerjaan dan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Namun, dimulai dari 2021 hingga 2023, tingkat kemiskinan berangsur-angsur menurun. Pada tahun 2023, jumlah penduduk miskin mencapai 25,90 juta jiwa atau 9,36%, turun sebesar 0,21%. Indonesia bagian timur mencatat tingkat kemiskinan tertinggi, sementara Pulau Kalimantan berada pada tingkat menengah dengan persentase konsisten di bawah 10% setiap tahunnya. Penelitian ini mengkaji pengaruh indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka, dan upah minimum terhadap kemiskinan. Pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat terus bekerja sama untuk menekan angka kemiskinan, mendukung perekonomian global, serta mendorong Indonesia menjadi negara maju.

Kemiskinan di Kalimantan Barat mencerminkan kompleksitas sosial dan ekonomi, meskipun wilayah ini kaya akan sumber daya alam. Mayoritas penduduk miskin tinggal di pedesaan dengan akses terbatas ke pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Angka

kemiskinan menurun dalam lima tahun terakhir, namun lajunya lambat terutama akibat pandemi COVID-19 yang memperburuk kerentanan ekonomi, terutama di daerah terpencil. Tantangan utama meliputi kesenjangan wilayah, distribusi kekayaan yang tidak merata, ketergantungan pada sektor primer, konflik agraria, dan keterbatasan layanan publik. Untuk mengatasi kemiskinan, diperlukan strategi komprehensif seperti pemberdayaan masyarakat, peningkatan infrastruktur, akses layanan dasar yang merata, dan kebijakan inklusif. Pendekatan multidimensi yang mencakup kesehatan, pendidikan, dan ketahanan ekonomi diperlukan untuk memastikan pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah metrik yang digunakan untuk mengevaluasi perkembangan ekonomi dan sosial suatu negara bahkan daerah yang tidak hanya berfokus pada pendapatan, tetapi juga mempertimbangkan faktor- faktor seperti pendidikan dan kesehatan. IPM mencerminkan tingkat kesejahteraan manusia dalam suatu negara dengan cara yang lebih detail. Melibatkan tiga indikator utama, IPM memberikan pandangan yang lebih luas tentang kondisi kesejahteraan manusia daripada sekadar mengukur pendapatan ekonomi semata. Biasanya, tingkat kemiskinan sering dikaitkan dengan kualitan indeks pembangunan manusia yang rendah, karena kurangnya akses terhadap pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang tidak memadai, dan standar hidup yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dengan demikian, IPM bisa digunakan sebagai landasan untuk menjelaskan fenomena kemiskinan dengan menilai seberapa baik suatu negara memberikan akses dan kondisi hidup yang layak bagi warganya. Tingkat kemiskinan cenderung lebih tinggi di negara-negara dengan IPM yang rendah. Semakin rendah IPM, maka tinggi kemungkinan tingkat kemiskinan suatu negara atau daerah.

Faktor lainnya yang juga dapat menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk yang hidup dalam kemiskinan adalah tingkat pengangguran yang tinggi di suatu daerah. Pengangguran dapat terjadi ketika jumlah individu yang mencari pekerjaan melebihi jumlah lapangan kerja yang tersedia. Hal ini bisa terjadi karena bertambahnya angkatan kerja setiap tahun, sementara lapangan kerja tidak bertambah seiringnya. Situasi ini menjadi semakin serius karena lajunya pertumbuhan populasi dalam frekuensi yang besar. Selain itu, kebangkrutan industri juga dapat menyebabkan pengurangan karyawan masal, yang akhirnya akan meningkatkan angka pengangguran dan berpotensi meningkatkan angka kemiskinan di suatu wilayah. Dengan demikian, apabila tingkat penangguran tinggi, semakin besar kemungkinan jumlah masyarakat yang hidup dalam kondisi kemiskinan akan meningkat. Pengangguran terbuka biasanya terjadi di daerah perkotaan.

Upah minimum kabupaten merupakan jumlah imbalan terendah yang diatur pemerintah setempat untuk wilayah kabupaten atau kota tertentu. Penetapan upah minimum kabupaten dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk biaya hidup, tingkat inflasi, dan kondisi ekonomi setempat. Namun, upah minimum kabupaten biasanya lebih rendah daripada upah minimum nasional karena mempertimbangkan biaya hidup yang berbeda di daerah kota dan desa serta tingkat perkembangan ekonomi yang berbeda. Daerah-daerah dengan upah minimum yang rendah cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi karena sulit bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dengan penghasilan yang rendah. Selain itu, upah

minimum yang rendah menghambat pertumbuhan ekonomi lokal karena masyarakat memiliki kemampuan daya beli yang terbatas. Hal ini dapat menghambat investasi dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, sehingga memperburuk kondisi kemiskinan dalam jangka panjang.

Tabel 1

Data Kemiskinan Menurut Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 (%)

Kabupaten/Kota	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata
Kalimantan Barat	7,49	7,17	7,15	6,73	6,71	7,05
Sambas	8,19	7,70	7,66	6,92	7,08	7,51
Bengkayang	6,96	6,62	6,48	6,03	6,28	6,47
Landak	11,47	11,12	10,99	10,01	9,97	10,71
Mempawah	5,32	4,95	5,18	5,32	5,21	5,20
Sanggau	4,57	4,46	4,55	4,51	4,79	4,58
Ketapang	10,54	10,29	10,13	9,39	9,25	9,92
Sintang	9,65	9,27	9,28	8,57	8,18	8,99
Kapuas Hulu	9,62	8,99	8,93	8,59	8,16	8,86
Sekadau	6,11	5,87	6,26	5,85	5,90	6,00
Melawi	12,38	12,04	12,01	11,44	11,12	11,80
Kayong Utara	9,98	9,56	9,33	9,04	9,13	9,41
Kubu Raya	4,74	4,42	4,34	4,12	4,23	4,37
Kota Pontianak	4,88	4,70	4,58	4,46	4,45	4,61
Kota Singkawang	4,91	4,53	4,83	4,67	4,70	4,73

Sumber : Badan Pusat Statistik 2023

Berdasarkan tabel 1 tentang kemiskinan Kalimantan Barat pada tahun 2019-2023 diatas, dapat dilihat dari rata-rata bahwa Kabupaten yang menjadi daerah dengan penduduk miskin terbanyak yakni di Melawi dengan rata-rata 11,80%. Sedangkan Kabupaten Kubu Raya menjadi daerah yang kemiskinannya berada di presentase terendah yaitu hanya sebesar 4,37%. Sejauh ini terlihat penurunan angka kemiskinan yang signifikan di setiap Kabupaten/Kota dari tahu ke tahun. Namun meskipun demikian masalah ini tidak bisa

dianggap sepele. Perkembangan mengenai penuruan kemiskinan harus terus dipantau progresnya. Kemiskinan menjadi cerminan ketidakberhasilan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Oleh sebab itu diperlukan berbagai faktor penunjang dalam mengentaskan kemiskinan.

Tabel 2

Data Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023

Kab/Kota	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata
Sambas	67,02	68,97	69,03	69,88	70,60	69,10
Bengkayang	67,57	67,87	68,04	68,74	69,53	68,35
Landak	65,96	66,10	66,33	67,28	68,22	66,78
Mempawah	65,50	66,71	67,00	67,91	68,91	67,21
Sanggau	65,67	66,73	67,18	67,87	68,73	67,24
Ketapang	67,16	68,13	68,39	68,86	69,61	68,43
Sintang	66,70	67,61	67,66	68,59	69,39	67,99
Kapuas Hulu	65,65	65,92	65,98	66,91	67,86	66,46
Sekadau	64,34	65,33	65,48	66,13	66,83	65,62
Melawi	65,54	65,74	66,06	66,99	67,92	66,45
Kayong Utara	62,66	63,97	64,18	65,09	66,06	64,39
Kubu Raya	67,76	68,89	69,09	69,83	70,50	69,21
Pontianak	79,35	80,10	80,59	81,10	81,63	80,55
Singkawang	71,72	72,73	72,90	73,66	74,13	73,03

Sumber : Badan Pusat Statistik 2023

Berdasakan tabel 2 yang menunjukkan data indeks pembangunan manusia di Kalimantan Barat selama tahun 2019-2023 diatas, dapat dilihat bahwa kota Pontianak memiliki indeks pembangunan manusia tertinggi setiap tahunnya, bahkan tahun 2023 berada di angka 80,55. Artinya dari segi pendidikan, kesehatan, bahkan pendapatan masyarakatnya berada di kualitas yang baik. Sedangkan indeks pembangunan manusia dengan indeks yang terendah adalah kabupaten Kayong Utara yakni sebesar 64,39.

Tabel 3

Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 (%)

Kab/Kota	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata
Sambas	3,48	3,71	3,97	5,08	5,04	4,26
Bengkayang	2,66	3,91	4,42	2,84	2,92	3,35
Landak	2,69	3,38	3,22	1,78	2,24	2,66
Mempawah	5,11	7,55	7,71	7,48	7,33	7,04
Sanggau	3,00	3,52	3,45	3,76	3,86	3,52
Ketapang	4,39	7,30	6,94	6,71	6,57	6,38
Sintang	3,10	4,50	3,95	2,97	2,92	3,49
Kapuas Hulu	2,43	4,02	4,18	2,21	2,19	3,01
Sekadau	3,04	3,39	2,92	1,33	2,29	2,59
Melawi	2,39	2,70	2,66	1,95	2,46	2,43
Kayong Utara	3,89	3,71	3,78	3,10	3,04	3,50
Kubu Raya	5,50	7,14	7,02	6,87	6,76	6,66
Pontianak	9,06	12,36	12,38	9,92	8,92	10,53
Singkawang	6,31	8,78	9,16	8,63	8,51	8,28

Sumber : Badan Pusat Statistik 2023

Berdasarkan data pada tabel 3 diatas, dapat dilihat bahwa tingkat pengangguran terbuka dengan presentase tertinggi ada di kota Pontianak yakni sebesar 10,53%. Hal yang dapat menyebabkan tingginya tingkat pengangguran di kota dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor diantaranya akibat urbanisasi yang meningkatkan jumlah pencari kerja melebihi lapangan kerja, persaingan ketat, serta ketidaksesuaian kualifikasi dengan kebutuhan pasar. Transformasi ekonomi dari manufaktur ke jasa juga mengurangi peluang kerja di sektor tradisional. Selain itu, selektivitas terhadap pekerjaan, biaya hidup tinggi, dan ketergantungan pada pekerjaan formal turut memperparah pengangguran di kota. Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa pengangguran terkecil berada di Kabupaten Melawi. Meskipun secara keseluruhan Melawi merupakan daerah dengan tingkat kemiskinan terbesar di Kalbar, namun angka pengangguran kecil karena rata-rata penduduk memiliki pekerjaan khususnya di bidang agrari.

Tabel 4

Data Upah Minimum Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 (Rupiah)

Kab/Kota	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata
Sambas	2.377.000	2.580.000	2.600.000	2.609.398	2.792.599	2.591.799
Bengkayang	2.364.777	2.566.019	2.566.019	2.586.291	2.767.564	2.570.134
Landak	2.345.870	2.549.844	2.579.844	2.582.000	2.767.310	2.564.974
Mempawah	2.232.600	2.422.594	2.422.594	2.437.279	2.608.601	2.424.734
Sanggau	2.318.000	2.515.262	2.215.262	2.547.405	2.703.536	2.459.893
Ketapang	2.636.000	2.860.323	2.860.323	2.876.252	3.085.615	2.863.703
Sintang	2.393.000	2.596.644	2.569.644	2.611.966	2.771.035	2.588.458
Kapuas Hulu	2.381.700	2.483.000	2.483.000	2.486.796	2.661.842	2.499.268
Sekadau	2.267.970	2.461.000	2.461.000	2.486.031	2.654.770	2.466.154
Melawi	2.288.306	2.483.040	2.483.040	2.515.896	2.682.398	2.490.536
Kayong Utara	2.501.850	2.714.750	2.714.750	2.748.507	2.930.678	2.722.107
Kubu Raya	2.242.000	2.433.000	2.433.000	2.467.630	2.646.878	2.444.502
Pontianak	2.318.000	2.515.000	2.515.000	2.579.616	2.750.644	2.535.652
Singkawang	2.338.840	2.537.875	2.537.875	2.596.120	2.781.898	2.558.522

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kalimantan Barat, 2023

Berdasarkan data pada tabel 4 diatas, dapat dilihat bahwa Kabupaten dengan upah tertinggi adalah di Kabupaten Ketapang dengan jumlah rata-rata selama 5 tahun adalah Rp. 2.863.703 sedangkan untuk upah per-tahun nya mencapai angka tertinggi pada tahun 2023 yakni Rp.3.085.615 yang bahkan lebih besar dibandingkan upah minimum regional Provinsi. Kabupaten yang memiliki upah minimum terendah berada di Mempawah dengan rata-rata selama 5 tahun terakhir yakni Rp. 2.424.734. Penyesuaian upah minimum penting untuk mencegah kemiskinan karena menjamin kebutuhan hidup layak, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan meningkatkan produktivitas pekerja. Upah yang memadai juga menjaga stabilitas sosial, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, serta mengimbangi inflasi agar daya beli tetap terjaga. Langkah ini diperlukan untuk melindungi kesejahteraan pekerja dan menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.